

BAB I

PENDAHULUAN

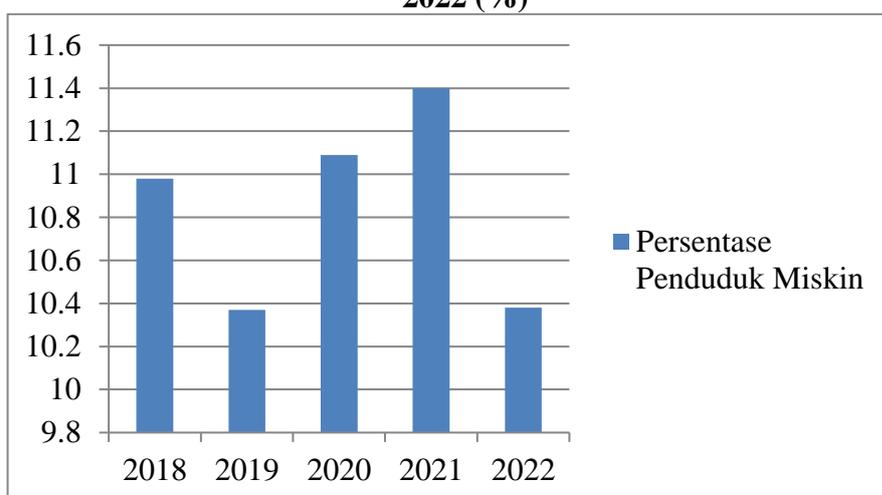
1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya yang dilakukan suatu negara untuk mendapatkan kesejahteraan rakyatnya. Proses pembangunan didasarkan pada perencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan daerah. Perencanaan ini mencakup rentang waktu yang berbeda, termasuk rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Oleh sebab itu, proses pembangunan dilakukan sesuai rencana yang disusun, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesediaan daerah secara bertahap. Peningkatan ekonomi dapat dinilai dari pengentasan kemiskinan, yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan (Rasyitu, 2017). Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang sangat kompleks, dengan banyak faktor yang berperan sebagai penyebabnya dalam suatu negara (Nafi'ah, 2021). Kemiskinan tetap menjadi tantangan yang dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan timbul saat individu atau kelompok tidak dapat mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan mereka (Adriana, 2020).

Pengentasan kemiskinan merupakan nilai inti pembangunan atau disebut nilai kecukupan yang didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Yoga et al., 2022). Semakin rendah tingkat kemiskinan dalam suatu negara, semakin baik kemajuan

pembangunannya. Sebaliknya, negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, maka sulit untuk meningkatkan kualitas pembangunan (Damanik & Sidauruk, 2020). Permasalahan kemiskinan ini tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur.

Grafik 1.1
Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2022 (%)

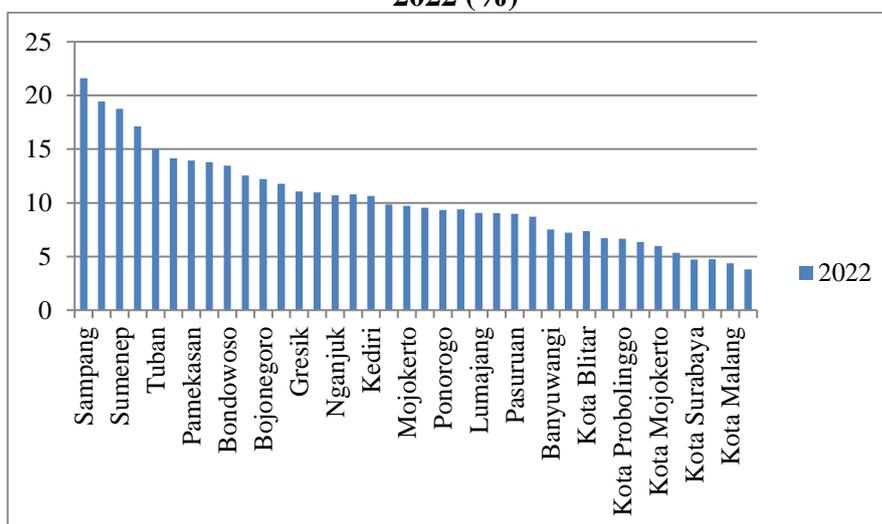


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023 (diolah)

Grafik 1.1, menunjukkan perubahan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 10,37 % dari tahun sebelumnya, namun naik kembali pada tahun 2020 menjadi 11,09 %. Tahun 2021, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, yang kemudian turun kembali pada tahun 2022 menjadi 10,38 %. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, Provinsi ini masih tercatat sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa, menempati posisi ketiga setelah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan yang tergolong tinggi ini menjadikan kemiskinan sebagai kunci dari segala pembangunan dan perlu disembuhkan atau paling tidak dikurangi (Hakim, 2023). Upaya

pengentasan kemiskinan memerlukan rencana dan keputusan pemerintah yang didasarkan pada kondisi masing-masing daerah. Sebab peningkatan angka kemiskinan akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kemiskinan harus komprehensif dan efektif untuk menyelesaikan akar permasalahan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan bergantung pada ketersediaan data kemiskinan yang akurat (BAPPENAS, 2020). Dengan memiliki data yang tepat dan akurat mengenai tingkat kemiskinan, maka pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengidentifikasi masalah-masalah spesifik dan merancang solusi yang lebih efektif. Berikut merupakan grafik tingkat kemiskinan di wilayah Jawa Timur.

Grafik 1.2
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2022 (%)

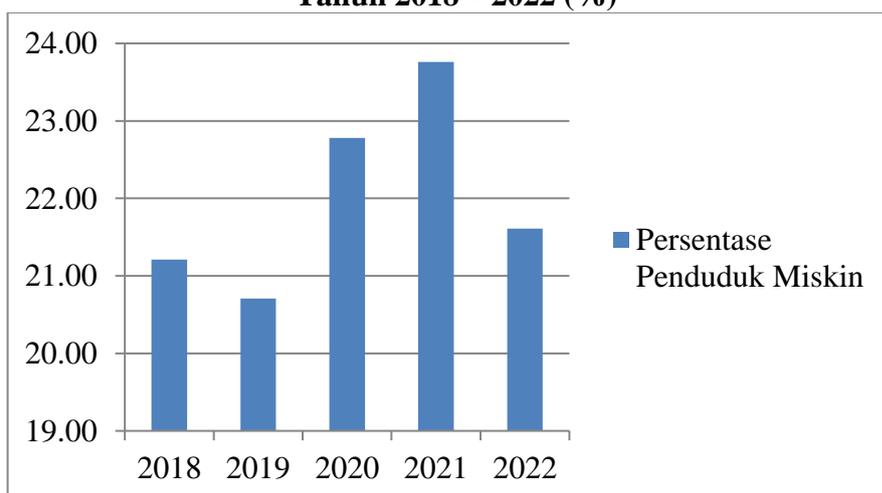


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023 (diolah)

Jika dilihat grafik 1.2, kemiskinan menjadi permasalahan utama di Kabupaten Sampang pada tahun 2022, dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang mencapai 21,61 %. Berdasarkan grafik Tingkat Kemiskinan

Menurut Kaupaten/ Kota di Jawa Timur, Kabupaten Sampang menempati posisi paling tinggi tingkat kemiskinannya, kemudian disusul oleh Kabupaten Bangkalan dengan tingkat persentase 19,44 %, dan posisi ketiga yaitu Kabupaten Sumenep 18,76 %. Oleh karena itu, untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Sampang, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sampang untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sampang. Berikut data persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang.

Grafik 1.3
Tingkat Kemiskinan Miskin di Kabupaten Sampang
Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023 (diolah)

Jika dilihat Grafik 1.3, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang dari tahun 2018 hingga 2022 terjadi fluktuatif. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, namun meningkat signifikan menjadi 22,78% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang kembali meningkat menjadi 23,76%, namun menurun menjadi 21,61% pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Walaupun Kabupaten Sampang mencatat penurunan

angka kemiskinan, namun tingkat kemiskinannya masih melebihi daerah lain di Jawa Timur, sehingga Pemerintah Kabupaten Sampang perlu memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola, mengeksplorasi, dan mengalokasikan dana daerah secara proposional sesuai dengan sebanding dengan prioritas atau kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlunya pengentasan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang, dan hal ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah Kabupaten Sampang.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor termasuk ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya, disparitas pendapatan, variasi dalam kualitas tenaga kerja, serta akses yang berbeda terhadap modal. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mengakibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan dan menghambat proses pembangunan di suatu daerah (Selvi, 2022). Tingkat Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk Kemandirian Keuangan Daerah. Ketika tingkat kemandirian keuangan daerah tinggi, diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki potensi untuk meningkatkan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi tingkat kemiskinan. (Purnomo & Danuta, 2022).

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan penduduk lokal menurut ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Fauziyah & Sriharyani,

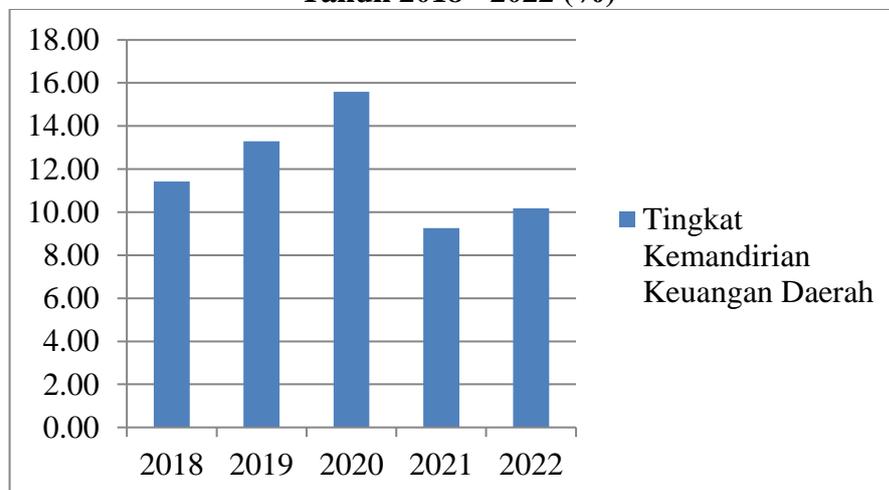
2018). Tujuan terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satunya adalah menciptakan kemandirian daerah dengan meningkatkan potensi pendapatan daerah (Riskiyani & Nasir, 2021). Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk sumber daya keuangannya sendiri. Otoritas pemerintah daerah untuk mengelola atau mengurus sendiri pendapatannya sehubungan dengan potensi sumber daya yang digunakan untuk membiayai pemerintahannya. Desentralisasi fiskal adalah proses di mana pemerintah pusat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mencari sumber pendapatan, mendapatkan dana dari pemerintah pusat, dan mengelola belanja daerah secara mandiri, memberikan kesempatan untuk mengontrol pengelolaan anggaran tanpa campur tangan Pemerintah Pusat (Ningsih et al., 2023).

Tantangan yang sering muncul dalam menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah mampu mandiri dalam pengelolaan potensi daerahnya untuk membiayai program konstruksi dan memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah. (Febiandani & Aji Suseno, 2018). Kemandirian keuangan daerah yang tinggi di tingkat daerah dapat mempengaruhi cara pemerintah daerah merencanakan sumber dana untuk pembangunan, menjalankan administrasi, dan memberikan layanan masyarakat. Dampaknya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah menjadi berkurang (Bappenda, 2021).

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyediakan pendanaan bagi mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan

daerah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dinilai dengan mempertimbangkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka peran pemerintah pusat dalam mengatur keuangan daerah akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya (Prakoso et al., 2019).

Grafik 1.4
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2018 - 2022 (%)



Sumber: Neraca APBD (diolah)

Dilihat pada grafik 1.4, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sampang dari tahun 2018 hingga 2022 berada dalam rentang antara 0 hingga 25 %. Pada periode tersebut, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dari 2018 hingga 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan, tahun berikutnya 2021 mengalami penurunan, diikuti dengan kenaikan pada tahun 2022 mencapai 10,17%. Ini menunjukkan bahwa dominasi pemerintah pusat lebih besar. Atau dapat diinterpretasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Kabupaten Sampang masih tergolong rendah

dibandingkan transfer pusat ke daerah. Kabupaten Sampang belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan peran mereka dalam menggali potensi yang tersedia di wilayah tersebut untuk mendukung anggaran atau keuangan pemerintahan daerah.

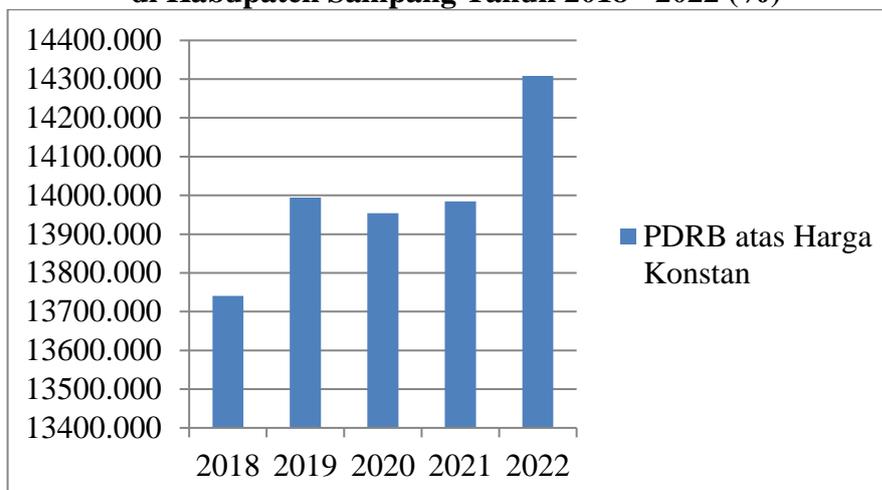
Diantara kabupaten yang ada di Pulau Madura, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sampang lebih rendah dibandingkan Kabupaten di Pulau Madura lainnya. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2022 di Kabupaten Bangkalan sebesar 13,74 %, Kabupaten Pamekasan 14,07 %, dan Kabupaten Sumenep 11,74 %. Meskipun tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih tergolong instruktif tetapi tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sampang. Ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat untuk membiayai program pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan lokal dan meningkatkan pelayanan masyarakat semakin terbatas.

Selain tingkat kemandirian keuangan daerah, berhasilnya suatu pembangunan dapat tercermin dari Pertumbuhan Ekonomi yang merata pada setiap kelompok pendapatan, dengan memperhatikan sektor – sektor yang berpengaruh dengan penduduk miskin. Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan (Akbar & Prabowo, 2023). Todaro dan Smith dalam (Hasibuan et al., 2022) pertumbuhan ekonomi suatu

daerah dinyatakan melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah atas dasar harga konstan. Tingginya PDRB suatu wilayah mencerminkan kondisi ekonomi yang baik di wilayah tersebut. Sebaliknya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang rendah mencerminkan buruk atau lemahnya kondisi perekonomian di wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijelaskan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. (Hasibuan et al., 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merangkum dan menjelaskan perkembangan perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi setempat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, karena terdapat peluang untuk memaksimalkan pertumbuhan yang nantinya akan berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah maka semakin baik pula perkembangannya. Hal ini dapat berkontribusi secara tidak langsung dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Menurut penelitian (Damanik & Sidauruk, 2020), kenaikan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut.

Grafik 1.5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
di Kabupaten Sampang Tahun 2018 - 2022 (%)



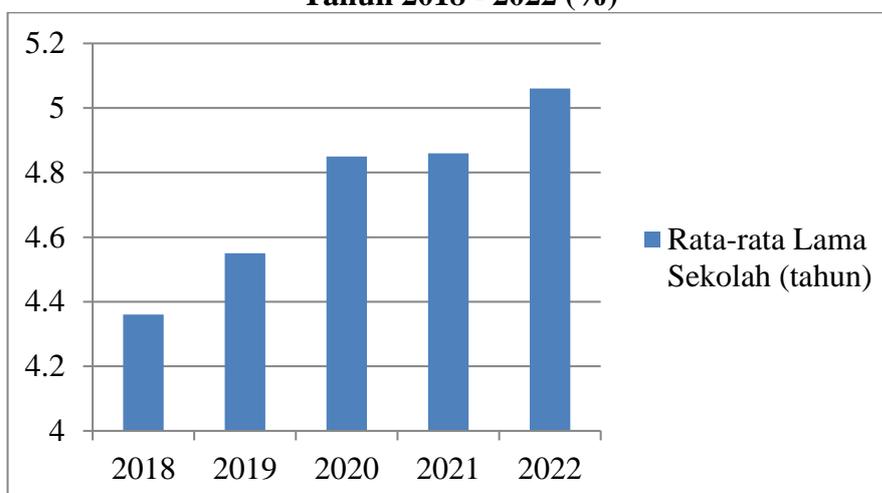
Sumber data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023(diolah)

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sampang merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai kinerja pembangunan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, dapat membantu mengidentifikasi arah perekonomian daerah secara lebih terperinci dari masa ke masa. Dari grafik 1.5, terlihat bahwa PDRB Kabupaten Sampang pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB Kabupaten Sampang, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan pada PDRB Kabupaten Sampang, mencapai 14308,3 miliar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2022 (BPS, 2023), sektor – sektor penyumbang PDRB di Kabupaten Sampang antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia akan mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu wilayah (Herry et al., 2021). Ciri kemiskinan yang lain adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan suatu investasi yang dampaknya di masa depan. Melalui pendidikan, individu dapat berkembang dan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Jika pendidikan di suatu daerah tidak dikembangkan dengan baik, hal ini dapat berpengaruh pada pembangunan daerah tersebut karena pendidikan memperkuat karakter suatu bangsa.

Keterlibatan yang minim dalam pendidikan atau terputus sekolah pada penduduk miskin dapat disebabkan oleh kurangnya biaya yang mencukupi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Salah satu cara untuk menilai kualitas pendidikan suatu daerah dengan menggunakan rata-rata lama sekolah (Salim, 2023). Cara ini dipakai untuk mengukur sejauh mana penduduk telah menyelesaikan pendidikan formal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin meningkat pula pengetahuan dan keterampilannya, yang tercermin pada peningkatan produktivitas (Hasanah et al., 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Kabupaten Sampang menempati posisi terbawah di Provinsi Jawa Timur dalam hal rata-rata lama sekolah, yaitu sebesar 5,06 tahun. Ini sama dengan menyelesaikan kelas 5 (lima) di tingkat pendidikan dasar. Rendahnya akses terhadap pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas masyarakat dan pada akhirnya berujung pada kemiskinan.

Grafik 1.6
Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Sampang
Tahun 2018 - 2022 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023 (diolah)

Berdasarkan Grafik 1.6, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten Sampang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2022. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Sampang pada tahun 2018 adalah 4,36 tahun dan naik menjadi 4,55 tahun pada tahun 2019. Begitu pula pada tahun 2020 dan 2021, terjadi peningkatan menjadi 4,85 tahun dan 4,86 tahun. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam rata-rata lama sekolah menjadi 5,06 tahun. Meskipun rata-rata lama sekolah Kabupaten Sampang meningkat pada tahun 2022, namun tetap menempati posisi paling rendah di Jawa Timur. Peningkatan atau penurunan rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengangkat topik permasalahan ini dan mengetahui sejauh mana Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Rata – Rata Lama Sekolah dapat mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di

Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “*Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, PDRB, dan Rata – Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang?
- 1.2.2. Apakah terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang?
- 1.2.3. Apakah terdapat pengaruh antara Rata – Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang
- 1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang

1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh Rata – Rata Lama Sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Neraca APBD Kabupaten Sampang pada periode 2008 – 2022. Penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan antara lain:

- a. Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang
- b. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang
- c. Pengaruh Rata – Rata Lama Sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, meliputi:

1.4.1. Sebagai kontribusi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan kebijakan pembangunan, terutama di sektor ekonomi, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan agar dapat mendorong penanggulangan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sampang.

1.4.2 Sebagai salah satu studi empiris yang dapat menambah ilmu pengetahuan.

1.4.3 Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dan ingin untuk mengeksplorasi lebih lanjut topik yang serupa, untuk melengkapi kekurangan yang mungkin ada dalam penelitian ini.